

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN GUNUNG MAS
2017**

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN GUNUNG MAS
2017**

Nomor ISBN :
Ukuran Buku : 6,5 x 8,5 inchi
Jumlah Halaman : vii + 38 Halaman

Naskah
Penanggung Jawab Umum : Drs. Waras
Koordinator : Suryani, SST

Gambar Kulit
Koordinator : Rini Nurul Hidayah, SST

Editor
Koordinator : Elisamarta Rotua Sibagariang, SST

Diterbitkan Oleh :
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Gunung Mas

“Boleh Dikutip Dengan Menyebutkan Sumbernya”

KATA PENGANTAR

Buku **Indeks Pembangunan Manusia Gunung Mas 2017** merupakan bentuk publikasi dari kegiatan penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016.

Penyajian publikasi ini memuat data dan informasi awal untuk mengukur tingkat pembangunan manusia Kabupaten Gunung Mas beserta analisisnya. Diharapkan buku ini dapat memberikan informasi sebagai acuan dalam rangka perencanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan IPM 2016.

Dengan segala keterbatasan yang ada, kritik dan saran yang konstruktif dari para pengguna data, sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan pada penerbitan publikasi ini berikutnya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya sehingga publikasi ini dapat diterbitkan, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi para pengguna data.

Kuala Kurun, September 2017

**Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Gunung Mas**



Drs. DIHEL, M.Si.
NIP. 19690820 199403 1 019

**Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Gunung Mas**



Drs. WARAS
NIP. 19651212 199303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Sasaran	5
1.3 Ruang Lingkup	6
BAB II DATA DAN METODOLOGI	10
2.1. Basis Data Pembangunan Manusia	10
2.2. Pendekatan IPM Sebagai Penunjang Pembangunan Manusia	12
2.3. Tahapan Perhitungan IPM	15
BAB III IPM KABUPATEN GUNUNG MAS	19
3.1 Situasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunung Mas ..	19
3.2. IPM Kabupaten Gunung Mas	30
3.3. Pertumbuhan IPM	31
LAMPIRAN	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penentuan Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Indikator Komponen IPM.....	17
Tabel 2.2	Klasifikasi Capaian IPM.....	18
Tabel 3.1	Perkembangan Indeks Kesehatan, 2012 – 2016	23
Tabel 3.2	Perkembangan Indeks Pengetahuan Kabupaten Gunung Mas, 2012 – 2016.....	28
Tabel 3.3	Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah),..... 2012 – 2016.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Gunung Mas, 2012-2016.....	21
Gambar 3.2	Angka Harapan Hidup Se-Kalimantan Tengah, 2016.....	22
Gambar 3.3	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas, 2012 – 2016.....	24
Gambar 3.4	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, 2016.....	25
Gambar 3.5	Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas, 2012 – 2016.....	26
Gambar 3.6	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, 2016.....	27
Gambar 3.7	Perkembangan Angka IPM, 2012 – 2016.....	30
Gambar 3.8	Reduksi Shortfall Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah, 2016.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/ Kota di Kalimantan Tengah, 2012 – 2016	34
Lampiran 2.	Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2012 – 2016	35
Lampiran 3.	Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2012 – 2016	36
Lampiran 4.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2012 – 2016	37
Lampiran 5.	Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan atau <i>Purchasing Power Parity (PPP)</i> Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2012 – 2016	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kenyataan-kenyataan yang dialami berbagai negara dan masyarakat dalam rangkaian pembangunan ekonomi telah menggiring perkembangan pemikiran tentang makna pembangunan itu sendiri. Paradigma pembangunan ekonomi yang senantiasa didengung-dengungkan selama ini termasuk Indonesia, mengacu pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, secara nyata hal ini ditegaskan dalam Trilogi Pembangunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa target laju pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut dapat dicapai secara cepat, namun sebaliknya cenderung mengesampingkan aspek taraf hidup khalayak banyak.

Apapun unsur-unsur khusus dari kehidupan yang lebih baik ini, pembangunan dari setiap masyarakat paling tidak harus mengandung tiga tujuan (trilogi pembangunan) yakni;

1. Untuk meningkatkan tersedianya dan memperluas penyebaran barang kebutuhan pokok seperti makanan, tempat bernaung, kesehatan dan perlindungan bagi semua anggota masyarakat.
2. Untuk meningkatkan taraf hidup, meliputi lapangan pekerjaan, pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai budaya dan nilai manusiawi disamping pendapatan yang lebih tinggi.

3. Memperluas ragam pilihan ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan memerdekakan dari perbudakan dan ketergantungan, tidak saja dalam hubungannya dengan sesama masyarakat juga dari kebodohan.

Seperti diketahui, bahwa pelaksanaan pembangunan selama ini lebih mengedepankan pada konsep pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan menguntungkan manusia. Namun dalam kenyataannya tidaklah selalu demikian, dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi yang bagaimana dan untuk siapa. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah perlu adanya paradigm baru yakni pembangunan yang lebih mengedepankan aspek pembangunan manusia.

Tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan (World Development Report, 1991). Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan istitusi-institusi nasional. Pembangunan kini tidak hanya dari sisi pembangunan ekomomi saja, melainkan juga dari sisi pembangunan manusia. Manusia adalah kekayaan sesungguhnya yang dimiliki suatu bangsa. Oleh karenanya, pembangunan manusia kini menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (United Nation Development Programme – UNDP).

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), pembangunan manusia merupakan suatu model pembangunan yang ditujukan untuk memperluas pilihan bagi penduduk yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Hal ini dapat dicapai melalui program pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu meningkatnya derajat kesehatan, berupa umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif serta mendapat penghasilan yang mencukupi dengan daya beli yang layak.

Berdasarkan konsep diatas, membangun manusia berarti meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam arti yang luas meliputi aspek jasmani dan rohani, material dan spiritual dalam skala individu maupun sosial yang pada akhirnya harus mampu menjadi sumberdaya pembangunan secara komprehensif. Seperti halnya pembangunan ekonomi, pembangunan manusia memerlukan ketersediaan analisis data guna perencanaan perencanaan dan pengambilan kebijakan agar tepat sasaran, juga perlu dievaluasi sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan mampu meningkatkan kualitas hidup manusia (penduduk) sebagai obyek pembangunan.

Salah satu alat ukur yang lazim digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengingat sangat luasnya dimensi pembangunan manusia. IPM dapat menggambarkan hasil pelaksanaan pembangunan manusia menurut tiga dimensi yang sangat mendasar. Alat ukur ini telah digunakan

baik pada tingkat nasional maupun internasional dalam melihat hasil-hasil pembangunan masing-masing propinsi atau negara. Selanjutnya alat ukur ini diperluas kegunaannya pada tingkat yang lebih rendah yaitu pada level kabupaten/kota.

Paradigma pembangunan manusia mengandung empat komponen utama;

1. Produktivitas. Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi penuh dalam mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan manusia.
2. Pemerataan. Masyarakat harus memiliki akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan agar masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapat mamfaat dari kesempatan-kesempatan ini.
3. Berkelanjutan. Akses untuk memperoleh kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan (fisik, manusia, lingkungan hidup) harus dilengkapi.
4. Pemberdayaan. Masyarakat diharapkan berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses-proses yang memengaruhi kehidupan mereka.

Penyertaan konsep pembangunan manusia dalam kebijakankebijakan pembangunan sama sekali tidak berarti meninggalkan berbagai strategi pembangunan terdahulu, antara lain mempercepat pertumbuhan ekonomi,

mengurangi kemiskinan, dan mencegah perusakan lingkungan. Namun, perbedaannya adalah bahwa dari sudut pandang pembangunan manusia, semua tujuan tersebut di atas diletakkan dalam kerangka untuk memperluas pilihan-pilihan bagi manusia.

Agar konsep pembangunan manusia dapat diterjemahkan ke dalam perumusan kebijakan, pembangunan manusia harus dapat diukur dan dipantau dengan mudah. UNDP dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR) global telah mengembangkan dan menyempurnakan pengukuran statistik dari pembangunan manusia, yaitu berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun dimensi dasar yang membentuk IPM ada 3, meliputi: Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), Pengetahuan (knowledge), dan Standar Hidup Layak (decent standard of living). Pada tahun 2010, UNDP memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode baru, kemudian pada tahun 2011 dan 2014 dilakukan penyempurnaan (IPM Metode Baru).

Untuk memperoleh gambaran tentang pembangunan manusia di Kabupaten Gunung Mas, maka disusunlah publikasi “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017”, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam penentuan kebijakan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penulisan ini adalah menyajikan data dan informasi tentang kondisi penduduk dan permasalahannya, sebagai dampak dari

pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Gunung Mas. Selanjutnya diharapkan dapat menjadi masukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia di Kabupaten Gunung Mas, termasuk penentuan sektor-sektor prioritas dalam pembangunan manusia.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini meliputi:

- a. Mengidentifikasi kondisi beberapa variabel sektoral dalam pembangunan manusia, meliputi bidang kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Gunung Mas.
- b. Memberikan gambaran permasalahan yang ada di bidang pembangunan manusia di Kabupaten Gunung Mas.
- c. Memberikan gambaran tentang perkembangan ukuran pembangunan manusia (IPM) dan indikator-indikator sosial lainnya di Kabupaten Gunung Mas.
- d. Merumuskan implikasi masalah dan kebijakan untuk menangani berbagai masalah yang merupakan bagian dari perencanaan dan penanganan pembangunan manusia.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi penulisan publikasi ini, meliputi:

- Identifikasi kondisi dimensi dalam pengukuran besaran IPM yang meliputi: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

- Identifikasi permasalahan mendasar pada sektor-sektor kunci yang terkait dengan IPM, meliputi indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
- Pengukuran besaran angka IPM Kabupaten Gunung Mas.
- Analisis Situasi Pembangunan Manusia di Kabupaten Gunung Mas.
- Rumusan kebijakan dalam rangka pembangunan manusia berdasarkan besaran angka IPM yang diperoleh dan hasil analisis situasi pembangunan manusia di Kabupaten Gunung Mas.

1.4 Istilah yang Digunakan (Terminologi)

Istilah yang digunakan dalam penulisan publikasi ini meliputi:

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks komposit yang disusun dari tiga indikator: lama hidup, pendidikan, dan standar hidup.
- Indeks Harapan Hidup, salah satu dari komponen IPM. Nilai ini berkisar antara 0 – 100.
- Indeks Pendidikan, Indeks ini didasarkan pada kombinasi antara angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.
- Indeks Pendapatan, didasarkan pada paritas daya beli (PPP) yang disesuaikan.
- Angka Harapan Hidup saat lahir, perkiraan lama hidup rata-rata seorang penduduk sejak dilahirkan.
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS), didefinisikan sebagai perkiraan rata-rata lamanya waktu yang ditempuh penduduk dalam menjalani pendidikan

formal, dengan asumsi dalam konsisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.

- Harapan Lama Sekolah (HLS), didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, HLS dihitung pada usia 7 tahun dan dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren.
- Pengeluaran per Kapita disesuaikan, ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.
- Partisipasi Angkatan Kerja, menggambarkan persentase penduduk yang membutuhkan pekerjaan (aktif secara ekonomis) atau memberi gambaran seberapa besar keterlibatan penduduk dalam ekonomi produktif.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengangguran terbuka di kalangan angkatan kerja.
- Kontribusi Sektor perekonomian dalam Penyerapan Tenaga Kerja, adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengetahui andil setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja.
- Persentase Penolong Persalinan, adalah suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan terutama berkaitan dengan pelayanan kesehatan reproduksi.
- Rata-rata Lama Sakit, adalah indikator yang menggambarkan tingkat intensitas penyakit yang diderita penduduk. Indikator ini juga menggambarkan besarnya kerugian materiil yang dialami penduduk

karena penyakit yang diderita. Semakin besar nilai indikator ini, semakin besar kerugian yang dialami.

- Angka Sakit, adalah indikator yang memberi gambaran prevalensi kesakitan (keluhan kesehatan) oleh masyarakat dan juga digunakan untuk melihat tingkat kesehatan penduduk suatu daerah.

BAB II

DATA DAN METODOLOGI

2.1. Basis Data Pembangunan Manusia

Kebutuhan untuk melihat fenomena atau masalah sering menuntut adanya ukuran baku dengan menyusun indeks agregat yang memungkinkan diturunkannya satu angka yang merangkum berbagai dimensi masalah yang sedang menjadi topik bahasan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh upaya pemberdayaan yang telah dicapai masyarakat secara cepat adalah indikator komposit. Beberapa indikator komposit yang telah dikembangkan dan direkomendasi UNDP adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Indikator tersebut digunakan dalam perspektif yang berbeda, dan dalam buku ini secara khusus hanya menyajikan IPM.

Perencanaan pembangunan manusia perlu menyadari bahwa yang berguna bagi perencanaan dan pembuatan kebijakan hanyalah data atau informasi yang memberikan gambaran keadaan sebenarnya (represent reality). Oleh karena itu, perlu dipahami secara memadai jenis pengumpulan data serta kualitas data yang dikumpulkan. Perencana pembangunan manusia juga harus dapat memanfaatkan secara optimal data yang relevan baik yang dikumpulkan melalui sensus dan survei maupun yang diperoleh dari instansi-instansi terkait terutama yang terkait dengan kesehatan,

pendidikan, angkatan kerja, keluarga berencana dan fertilitas, perumahan dan sanitasi, dan pengeluaran rumah tangga.

Informasi yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan manusia dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Perencana harus menyadari bahwa kedua jenis informasi tersebut saling melengkapi atau menunjang sehingga keduanya diperlukan untuk analisis, monitoring, dan evaluasi yang lebih baik.

IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga dimensi pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Oleh karena itu, untuk penyusunan IPM diperlukan data derajat kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat.

Dalam penyusunan publikasi “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017” digunakan tiga jenis data di atas yang diperoleh dari kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan setiap tahun oleh BPS. Survei tersebut merupakan kegiatan pengumpulan data yang mencakup berbagai aspek sosial dan ekonomi yang cukup kompleks. Susenas mengumpulkan berbagai informasi seperti kependudukan, kesehatan, fertilitas, pengeluaran rumah tangga, dan perumahan serta lingkungan.

2.2. Pendekatan IPM Sebagai Penunjang Pembangunan Manusia

IPM digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia secara keseluruhan dan bersifat agregatif. Meskipun demikian ukuran komposit ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bagi para perencana pembangunan di daerah tentang kualitas pembangunan yang telah dicapai selama ini. Secara umum, langkah yang ditempuh dalam menghadapi pengembangan tolok ukur fenomena yang sifatnya kuantitatif, selalu dimulai dengan memahami konsep dan definisi dan batasan baku masalah yang hendak diukur. UNDP sejak tahun 1990 menggunakan IPM untuk mengukur laporan tahunan perkembangan pembangunan manusia.

Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga dimensi yang dianggap sangat mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)

Pembangunan manusia harus lebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai “umur” yang panjang dan hidup sehat. Sebenarnya banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi ini tetapi dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara global, UNDP memilih indikator angka harapan hidup saat lahir (*life expectancy at birth*) yang biasa dinotasikan dengan *eo*. Angka harapan Hidup (AHH) dengan cara tidak

langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack. Angka kematian bayi (IMR) tidak digunakan untuk keperluan itu karena indikator itu dinilai tidak peka bagi negara-negara industri yang telah maju. Seperti halnya IMR, eo sebenarnya merefleksikan keseluruhan tingkat pembangunan dan bukan hanya bidang kesehatan. Di Indonesia eo dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini menggunakan dua macam data dasar, yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Prosedur penghitungan eo yang diperoleh dengan metode tidak langsung merujuk pada keadaan 3-4 tahun dari tahun survei.

2. Pengetahuan

Selain umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia. Dengan pertimbangan ketersediaan data, pengetahuan diukur dengan dua indikator, yaitu angka rata-rata lama sekolah / RLS (Mean Years of Schooling-MYS) dan angka harapan lama sekolah / HLS (Expected Years of Schooling -EYS). Sumber data yang digunakan untuk penghitungan RLS dan HLS berasal dari data Susenas, BPS.

Sementara itu, rata-rata lama sekolah (RLS) dihitung dengan mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP. RLS dihitung untuk penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir, dengan asumsi dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.

Angka Melek Huruf (AMH) tidak lagi digunakan dalam penghitungan IPM. AMH dianggap sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak menggambarkan kualitas pendidikan, juga karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Oleh karenanya, AMH diganti dengan Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa datang. Cakupan HLS dihitung dari penduduk usia 7 tahun ke atas dengan asumsi peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Kemudian untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren berasal dari Direktorat Pendidikan Islam.

3. Standar Hidup Layak

Selain umur panjang dan hidup sehat, dan pengetahuan, unsur dasar pembangunan manusia yang diakui secara luas adalah standar hidup layak. Banyak indikator alternatif yang dapat digunakan untuk mengukur unsur ini. Dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara internasional, UNDP memilih PNB (Produk Nasional Bruto) per kapita. Data PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan dengan menggunakan data Susenas. Penentuan nilai maksimum dan nilai minimum menggunakan Standar UNDP

untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, BPS, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.

Untuk menghitung pengeluaran per kapita yang disesuaikan pertama dihitung terlebih dahulu paritas daya beli untuk tiap unit barang atau Purchasing Power Parity (PPP/unit). Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas, dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

2.3. Tahapan Perhitungan IPM

Tahapan- tahapan dalam perhitungan angka IPM dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tahap pertama penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing-masing komponen IPM (Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Pengeluaran).

Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Dimana:

AHH = Angka Harapan Hidup saat Lahir

AHH_{maks} = Nilai Maksimum AHH

AHH_{min} = Nilai Minimum AHH

Dimensi Pendidikan

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Keterangan: HLS dan RLS dihitung dengan rumus sebagai berikut

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

Dimana:

I_{HLS} = Indeks Harapan Lama Sekolah

HLS = Harapan Lama Sekolah

HLS_{maks} = Nilai Maksimum Harapan Lama Sekolah

HLS_{min} = Nilai Minimum Harapan Lama Sekolah

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Dimana:

I_{RLS} = Indeks Rata-Rata Lama Sekolah

RLS = Rata-Rata Lama Sekolah

RLS_{maks} = Nilai Maksimum Rata-Rata Lama Sekolah

RLS_{min} = Nilai Minimum Rata-Rata Lama Sekolah

Dimensi Standar Hidup Layak (Pengeluaran)

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pendapatan}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

Keterangan: Indeks Pendapatan diproksi dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan

Tabel 2.1 Penentuan Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Indikator Komponen IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP US\$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352** (Rp)

Sumber : *Measuring The real Size of The World Economy, The World Bank.*

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

- Tahapan kedua perhitungan IPM yakni dengan menghitung geometrik dari Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Pengeluaran dengan rumus:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

- Tahap ketiga adalah menghitung kecepatan IPM, yang digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu tertentu.

$$Pertumbuhan\ IPM = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

IPM_t = IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} = IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut .

Tabel 2.2 Klasifikasi Capaian IPM

Klasifikasi	Capaian IPM
(1)	(2)
Sangat Tinggi	IPM ≥ 80
Tinggi	70 ≤ IPM < 80
Sedang	60 ≤ IPM < 70
Rendah	IPM < 60

Sumber: Badan Pusat Statistik

BAB III

IPM KABUPATEN GUNUNG MAS

3.1 Situasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunung Mas

Pada hakekatnya, manusia secara individual dan masyarakat secara kolektif merupakan sasaran dari proses pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan dilaksanakan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat dari kondisi sebelumnya. Dan untuk menciptakan perbaikan mutu hidup tersebut, berawal dari konsep perencanaan pembangunan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Model pembangunan manusia telah menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan yang berarti bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah dari rakyat (*of people*), untuk rakyat (*for people*), dan oleh rakyat (*by people*). Pembangunan dari rakyat mengandung makna pemberdayaan yaitu peningkatan kapabilitas melalui pendidikan, pelatihan, pemeliharaan kesehatan yang lebih baik, perumahan layak huni dan perbaikan gizi. Pembangunan untuk rakyat mengandung makna pemberdayaan yaitu peningkatan kapabilitas melalui pendidikan, pelatihan, pemeliharaan kesehatan yang lebih baik, perumahan layak huni dan perbaikan gizi. Pembangunan untuk rakyat berarti hasil pembangunan benar-benar ikut mengambil bagian dan berperan aktif dalam pembangunan, bukan sebagai penonton dan penerima hasil pembangunan. Dengan berperan aktif berarti ikut serta berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang pada

akhirnya akan mempengaruhi kehidupannya.

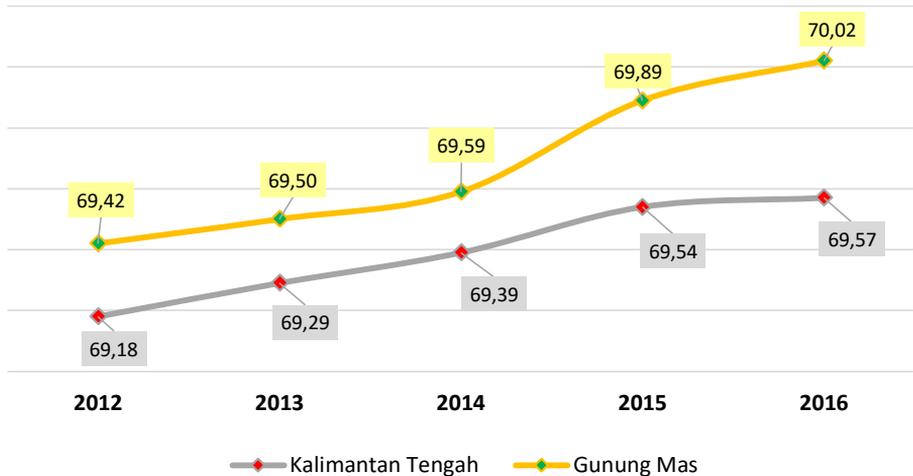
IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi dalam pembangunan. Namun indeks ini hanya akan memberikan gambaran perbandingan antar waktu dan perbandingan antar wilayah.

Sebelum pembahasan mengenai perbandingan IPM antar waktu, perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai keadaan dari masing-masing indikator (komponen) pembentuk IPM. Komponen-komponen tersebut adalah indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran.

3.1.1 Dimensi Kesehatan Kesehatan

Kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dapat dipandang dari aspek fisik dan non fisik yang tentunya saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Salah satu indikator utama dalam mengukur derajat kesehatan penduduk secara makro adalah angka harapan hidup saat lahir (AHH). AHH ini derajat kesehatan suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara makro.

Gambar 3.1 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Gunung Mas, 2012 – 2016

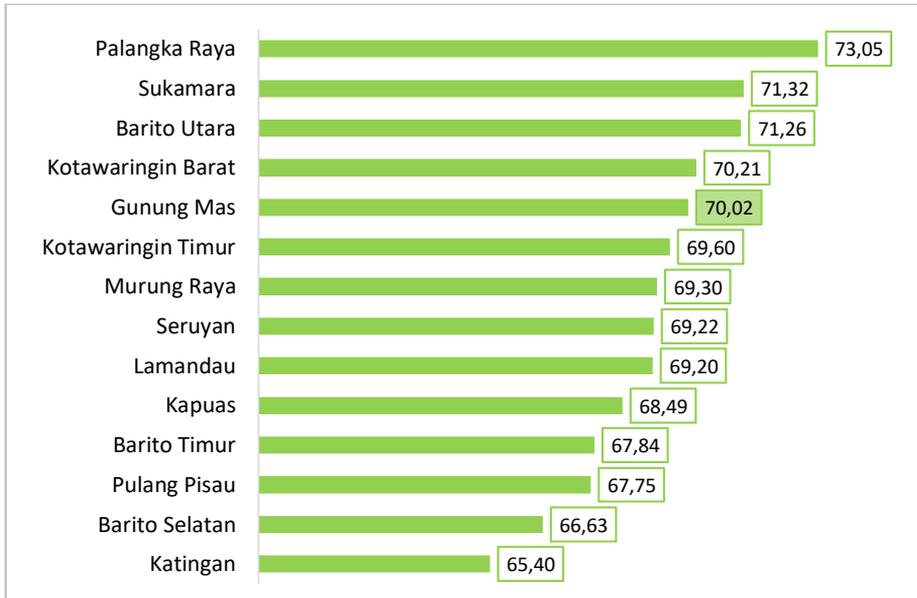


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan gambar 3.1, Secara perlahan terjadi peningkatan Angka Harapan Hidup dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016, Angka Harapan Hidup (AHH) hidup saat lahir di Kabupaten Gunung Mas sebesar 70,02 tahun. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya di mana AHH pada tahun 2015 sebesar 69,89 tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa terjadi peningkatan taraf kesehatan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas.

Gambar 3.1 juga menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Gunung Mas lebih tinggi jika dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 70,02, sedangkan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 69,57.

Gambar 3.2 Angka Harapan Hidup Kab/Kota Se-Kalimantan Tengah, 2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas

Jika dilihat keterbandingan antar kabupaten, maka Gunung Mas menempati urutan kelima dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Namun demikian, pemerintah tetap diharapkan meluncurkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan angka harapan hidup tersebut dapat dihitung angka Indeks Kesehatan seperti pada tabel berikut.

Tabel. 3.1 Perkembangan Indeks Kesehatan, 2012 – 2016

Tahun	Gunung Mas	Kalimantan Tengah
(1)	(2)	(3)
2012	76,03	75,66
2013	76,15	75,83
2014	76,29	75,98
2015	76,75	76,22
2016	76,95	76,26

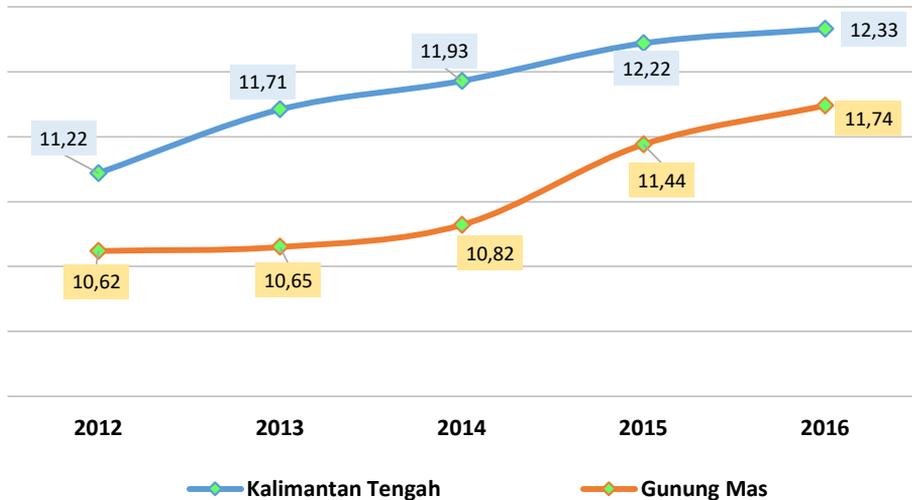
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat pada dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Indeks Kesehatan Kabupaten Gunung Mas mengalami peningkatan. Artinya, derajat kesehatan penduduk Kabupaten Gunung Mas terus mengalami peningkatan. Selain itu, Indeks Kesehatan Kabupaten Gunung Mas lebih juga tinggi dibandingkan Indeks Kesehatan Kalimantan Tengah seiring dengan nilai Angka Harapan Hidup.

3.1.2 Dimensi Pendidikan

Angka harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dengan angka harapan lama sekolah, dapat diketahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Gambar 3.3 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas, 2012 – 2016



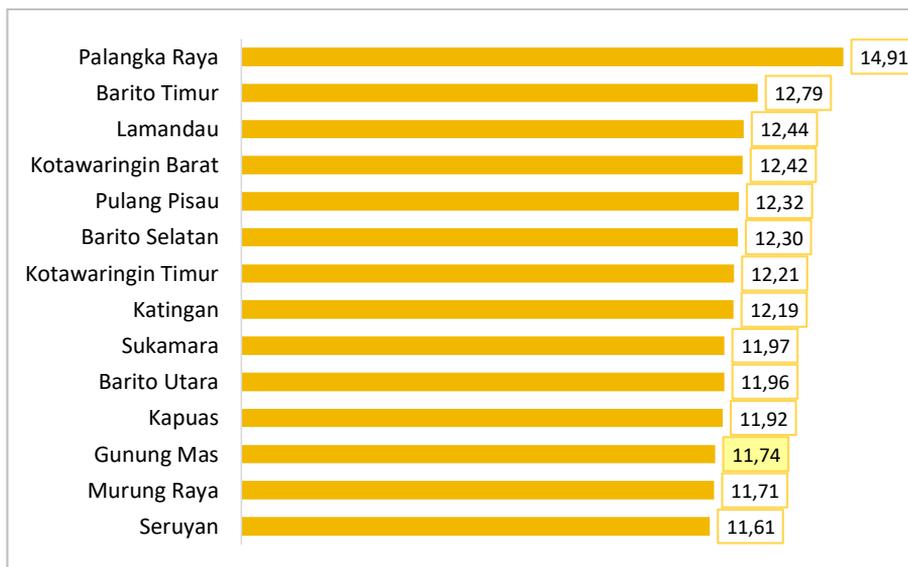
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas

Pada tahun 2016, angka harapan lama sekolah Kabupaten Gunung Mas mencapai 11,74. Ini berarti secara rata-rata penduduk usia 7 tahun akan mampu mengenyam pendidikan formal selama kurang lebih 11,44 tahun (sekitar kelas 2 SMA). Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya walau tidak signifikan yang sebesar 11,44 tahun.

Angka harapan lama sekolah Gunung Mas jika dibandingkan dengan Kalimantan Tengah tergolong cukup baik walaupun masih lebih rendah. Pada tahun 2016, pencapaian angka harapan lama sekolah provinsi Kalimantan Tengah adalah 12,33. Artinya, secara rata-rata penduduk usia 7 tahun akan mampu mengenyam pendidikan formal selama kurang lebih 12,33 tahun

(sampai lulus SMA). Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Gunung Mas diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenyam pendidikan lebih lama sehingga mampu bersaing dengan masyarakat se-Kalimantan Tengah.

Gambar 3.4 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, 2016



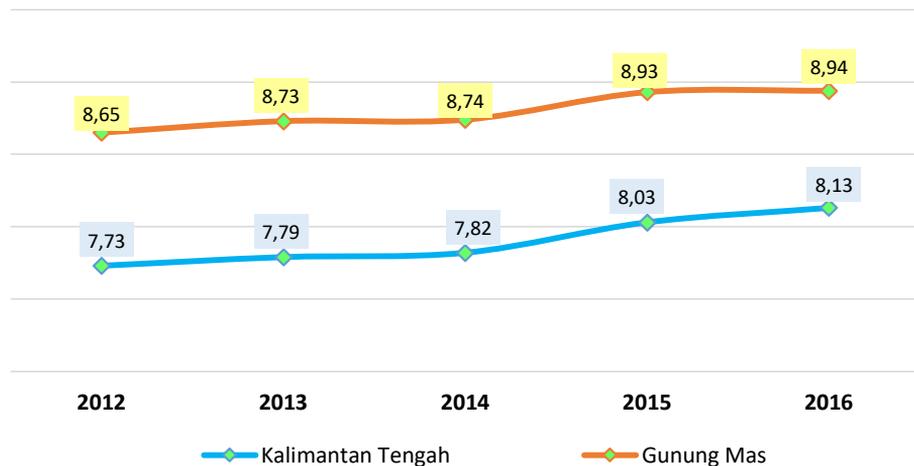
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas

Pada tahun 2016, Kota Palangka Raya dan Kabupaten Barito Timur diindikasikan sangat baik di bidang pencapaian angka Harapan Lama Sekolah. Angka Harapan Lama sekolah Palangka Raya menempati peringkat teratas se-Kalimantan Tengah, disusul Kabupaten Barito Timur, yaitu masing-masing sebesar 14,91 tahun dan 12,79 tahun. Hal ini berarti penduduk usia 7 tahun

di Kota Palangkaraya diperkirakan akan mengenyam pendidikan formal rata-rata selama 14,90 tahun atau sampai pada jenjang perguruan tinggi.

Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah, yaitu rata-rata yang telah dihabiskan oleh penduduk di seluruh jenjang pendidikan formal yang telah dijalani. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah diduduki, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Gambar 3.5 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas, 2012 – 2016

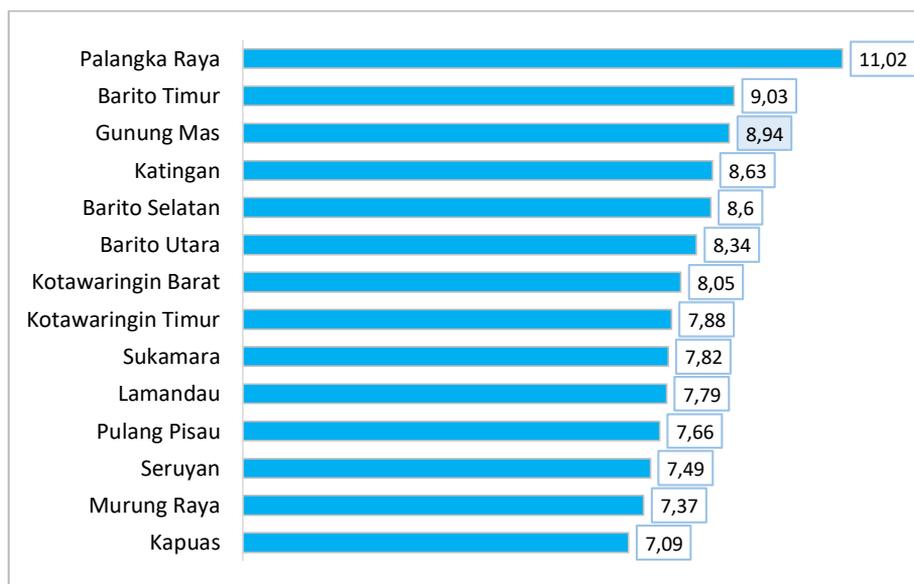


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas

Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Gunung Mas tahun 2016 sebesar 8,94 tahun. Dengan kata lain, rata-rata penduduk Kabupaten Gunung Mas yang berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan

selama 8 tahun atau hingga kelas 2 SMP. Hal ini mengindikasikan bahwa program pemerintah pusat dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun belum terealisasi di Kabupaten Gunung Mas. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mengupayakan kebijakan-kebijakan untuk merealisasikan pendidikan yang cukup dan berkualitas bagi penduduk Kabupaten Gunung Mas.

Gambar 3.6 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, 2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas

Sama halnya dengan capaian Angka Harapan Hidup, angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Gunung Mas lebih tinggi dibandingkan angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar 8,13 tahun

pada tahun 2016. Meskipun demikian, Angka Harapan Lama Sekolah baik di Kabupaten Gunung Mas maupun rata-rata Kalimantan Tengah belum menunjukkan taraf pendidikan yang cukup bagi penduduknya karena masih belum memenuhi wajib belajar 9 tahun. Melihat kondisi ini, tampaknya sektor pendidikan di kabupaten Gunung Mas perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Berdasarkan dua indikator pendidikan tersebut, maka dapat dihitung Indeks Pengetahuan yang ditunjukkan pada tabel berikut

Tabel 3.2 Perkembangan Indeks Pengetahuan Kabupaten Gunung Mas, 2012 – 2016

Tahun	Gunung Mas	Kalimantan Tengah
(1)	(2)	(3)
2012	58,33	56,93
2013	58,68	58,49
2014	59,19	59,21
2015	61,54	60,71
2016	62,41	61,35

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas

3.1.3 Dimensi Standar Layak Hidup

Indeks Pengeluaran diproksi dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Nilai dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan ini ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity – PPP*). Data rata-rata pengeluaran per kapita setahun bersumber dari BPS, kemudian data ini akan dibuat konstan/rill dengan

tahun dasar 2010. Paritas daya beli atau dikenal sebagai komponen kemampuan daya beli atau standar hidup layak menunjukkan seberapa besar jumlah barang/jasa yang mampu dibeli oleh masyarakat yang disesuaikan dengan pendapatan yang diterima/dimiliki.

Tabel 3.3 Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah), 2012 – 2016

Tahun	Gunung Mas	Kalimantan Tengah
(1)	(2)	(3)
2012	9.544	9.557
2013	9.823	9.641
2014	9.965	9.682
2015	10.044	9.809
2016	10.155	10.155

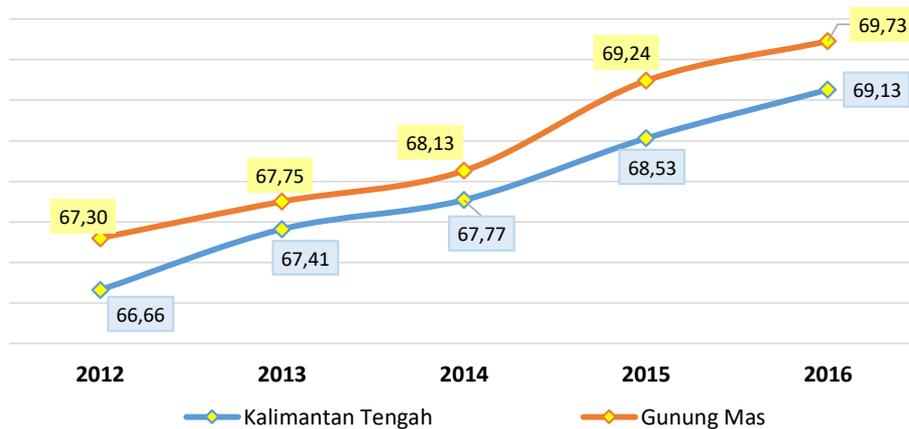
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan tabel 3.3, diperoleh gambaran pergerakan pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Gunung Mas yang terus meningkat lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, Pengeluaran Perkapita Kabupaten Gunung Mas sama dengan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 10,15 juta rupiah.

3.2. IPM Kabupaten Gunung Mas

Perbandingan antar indikator komponen IPM seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya merupakan tinjauan parsial, artinya tingkat keberhasilan pembangunan baru diukur dari satu komponen saja. Akan tetapi dengan adanya indikator tunggal IPM (Indeks Pembangunan Manusia) maka suatu gambaran komprehensif untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia dapat dilakukan. Indikator ini juga secara mudah dapat menggambarkan posisi kinerja pembangunan (output pembangunan) yang dicapai oleh suatu daerah.

Gambar 3.7 Perkembangan Angka IPM, 2012 – 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas

Dari agregat ketiga indikator tunggal penyusun IPM Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2016, diperoleh angka IPM Kabupaten Gunung Mas

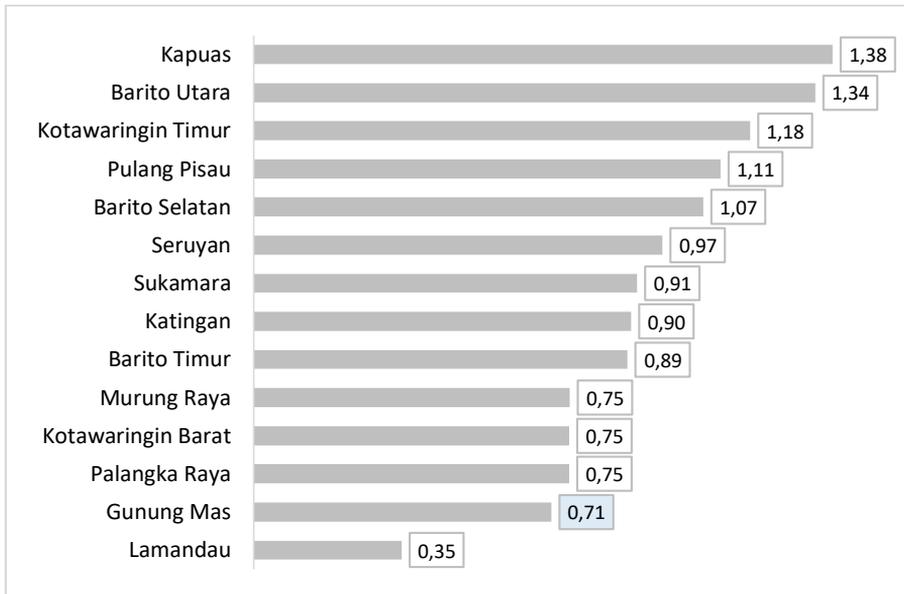
sebesar 69,73. Pencapaian angka IPM tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya yaitu sebesar 69,24. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Gunung Mas. Dengan capaian IPM tersebut, maka menurut Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kabupaten Gunung Mas termasuk dalam kategori kinerja pembangunan manusia Sedang, yaitu capaian IPM di antara 60 – 70.

3.3. Pertumbuhan IPM

Pertumbuhan IPM digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu tertentu. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh saat ini dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

Pada tahun 2016, pertumbuhan IPM Gunung Mas adalah 0,71. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan IPM pada tahun 2015 yang sebesar 1,63. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan pembangunan manusia di Gunung Mas masih cukup baik namun tidak secepat tahun lalu. Pertumbuhan IPM Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2016 menempati urutan ke-2 terendah dibandingkan kabupaten/kota lain di provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 3.8 Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah, 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas

LAMPIRAN

**Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/
Kota di Kalimantan Tengah, 2012 – 2016**

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kalimantan Tengah	66,66	67,41	67,77	68,53	69,13
Kotawaringin Barat	68,63	69,51	70,14	70,60	71,13
Kotawaringin Timur	66,61	67,95	68,45	68,61	69,42
Kapuas	64,38	64,82	65,29	66,07	66,98
Barito Selatan	65,76	66,20	66,61	68,27	69,00
Barito Utara	64,72	65,12	66,30	67,38	68,28
Sukamara	63,52	63,92	64,44	65,80	66,40
Lamandau	66,49	67,23	67,53	68,30	68,54
Seruyan	62,39	62,81	63,49	64,77	65,40
Katingan	64,87	65,29	65,79	66,81	67,41
Pulang Pisau	64,28	64,76	65,00	65,76	66,49
Gunung Mas	67,30	67,75	68,13	69,24	69,73
Barito Timur	67,97	68,82	69,12	69,71	70,33
Murung Raya	64,85	65,62	66,10	66,46	66,96
Palangka Raya	77,40	78,02	78,50	78,62	79,21

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 2. Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2012 – 2016

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kalimantan Tengah	69,18	69,29	69,39	69,54	69,57
Kotawaringin Barat	69,60	69,68	69,77	70,07	70,21
Kotawaringin Timur	69,24	69,32	69,41	69,51	69,60
Kapuas	68,13	68,21	68,30	68,40	68,49
Barito Selatan	65,92	65,99	66,08	66,48	66,63
Barito Utara	70,73	70,81	70,91	71,01	71,26
Sukamara	71,02	71,10	71,19	71,24	71,32
Lamandau	68,90	68,98	69,07	69,12	69,20
Seruyan	68,41	68,49	68,58	68,88	69,22
Katingan	64,82	64,89	64,98	65,28	65,40
Pulang Pisau	67,27	67,35	67,44	67,64	67,75
Gunung Mas	69,42	69,50	69,59	69,89	70,02
Barito Timur	67,24	67,32	67,41	67,71	67,84
Murung Raya	68,94	69,02	69,11	69,21	69,30
Palangka Raya	72,77	72,85	72,95	72,97	73,05

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 3. Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2012 – 2016

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kalimantan Tengah	11,22	11,71	11,93	12,22	12,33
Kotawaringin Barat	11,29	11,90	12,12	12,13	12,42
Kotawaringin Timur	10,89	11,82	12,04	12,05	12,21
Kapuas	10,76	10,95	11,14	11,64	11,92
Barito Selatan	10,96	11,01	11,14	11,99	12,30
Barito Utara	11,00	11,01	11,15	11,50	11,96
Sukamara	10,69	10,79	11,09	11,55	11,97
Lamandau	11,34	11,75	11,80	12,43	12,44
Seruyan	10,57	10,70	11,08	11,56	11,61
Katingan	11,14	11,40	11,69	12,03	12,19
Pulang Pisau	11,44	11,48	11,63	12,16	12,32
Gunung Mas	10,62	10,65	10,82	11,44	11,74
Barito Timur	11,27	11,77	11,98	12,31	12,79
Murung Raya	10,73	11,33	11,68	11,69	11,71
Palangka Raya	14,31	14,58	14,89	14,90	14,91

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 4. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2012 – 2016

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kalimantan Tengah	7,73	7,79	7,82	8,03	8,13
Kotawaringin Barat	7,49	7,58	7,82	8,01	8,05
Kotawaringin Timur	7,48	7,59	7,69	7,70	7,88
Kapuas	6,82	6,84	6,94	6,94	7,09
Barito Selatan	8,01	8,16	8,27	8,59	8,60
Barito Utara	7,74	7,97	8,00	8,33	8,34
Sukamara	7,04	7,21	7,30	7,81	7,82
Lamandau	7,38	7,55	7,67	7,68	7,79
Seruyan	6,76	6,90	7,03	7,45	7,49
Katingan	8,15	8,17	8,23	8,62	8,63
Pulang Pisau	7,29	7,55	7,58	7,59	7,66
Gunung Mas	8,65	8,73	8,74	8,93	8,94
Barito Timur	8,75	8,98	9,01	9,02	9,03
Murung Raya	7,12	7,15	7,18	7,36	7,37
Palangka Raya	10,48	10,69	10,73	10,74	11,02

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 5. Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan atau *Purchasing Power Parity (PPP)* Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2012 – 2016

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kalimantan Tengah	11.807	11.857	11.908	11.979	12.101
Kotawaringin Barat	10.170	10.343	10.430	10.525	10.922
Kotawaringin Timur	9.479	9.633	9.726	9.894	10.287
Kapuas	10.101	10.283	10.374	10.570	10.938
Barito Selatan	7.564	7.614	8.326	8.534	8.774
Barito Utara	7.522	7.545	7.568	7.709	7.792
Sukamara	9.837	9.881	9.925	9.999	10.049
Lamandau	7.873	7.919	7.958	8.026	8.331
Seruyan	9.357	9.452	9.542	9.599	9.969
Katingan	8.479	8.537	8.556	8.639	9.017
Pulang Pisau	9.544	9.823	9.965	10.044	10.155
Gunung Mas	10.436	10.450	10.465	10.570	10.631
Barito Timur	9.223	9.245	9.268	9.328	9.742
Murung Raya	2.311	12.397	2.521	12.629	12.899
Palangka Raya	11.807	11.857	11.908	11.979	12.101

Sumber: Badan Pusat Statistik